

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepulauan Riau merupakan kawasan kepulauan di Pulau Sumatera. Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau memiliki potensi wisata terutama wisata kepulauan dan bahari. Hal ini dikarenakan Kepulauan Riau memiliki wilayah perairan seluas 96%, dan hanya 4% wilayah daratan. Luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km².

Kepulauan Riau terdiri dari 7 Kabupaten dan Kota, yakni : Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Lingga. Seluruh Kabupaten dan Kota tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk dijadikan kawasan destinasi pariwisata, yakni: wisata alam, wisata bahari, wisata religi, wisata belanja, wisata agro, wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), wisata kuliner, wisata olahraga, wisata minat khusus, dan wisata sejarah. Maka tidak mengherankan jika banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung tiap tahunnya ke Kepulauan Riau.

Dengan beragamnya destinasi wisata yang dimiliki, Kepulauan Riau dikunjungi oleh lebih dari 2 juta wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Kepulauan Riau juga dianugerahi destinasi wisata bahari dan wisata kepulauan karena memiliki gugusan pantai rupawan yang menjadi pemikat para wisatawan untuk datang. Selain itu Kepulauan Riau juga memiliki banyak cagar budaya, wisata budaya dan sejarah yang juga menjadi alternatif destinasi wisata unggulan.

Oleh karena itu destinasi wisata di Kepulauan Riau menjadi tujuan favorit para wisatawan mancanegara dan domestik saat berkunjung di Kepulauan Riau.

Tabel 1.1 Provinsi dengan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Terbanyak di Indonesia

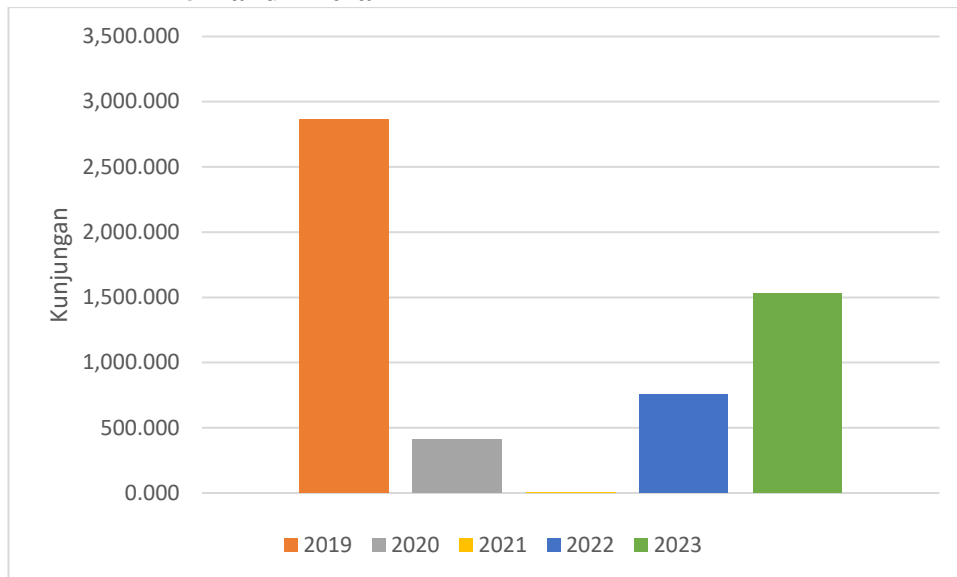
No	Provinsi	Persentase
1.	Bali	46,72%
2.	DKI Jakarta	13,03%
3.	Kepulauan Riau	11,81%
4.	Nusa Tenggara Barat	3,76%
5.	Jawa Timur	3,41%
6.	Jawa Barat	3,40%
7.	DI Yogyakarta	3,37%
8.	Riau	2,84%
9.	Sumatera Utara	1,91%
10.	Sumatera Barat	1,87%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pesona tempat wisata di Indonesia memang tidak diragukan lagi. Setiap provinsi di Indonesia memiliki berbagai destinasi wisata yang hampir tak pernah sepi pengunjung, baik dari dalam maupun luar negeri. Angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tiap tahunnya cukup menarik untuk dikulik. Dengan meningkatnya jumlah pelancong mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tidak semata-mata memberikan dampak positif bagi pariwisata tetapi juga memberikan kontribusi bagi perekonomian.

Tingkat kunjungan wisman Kepri bersanding dengan Provinsi Bali dan DKI Jakarta, atau berada di tiga teratas secara nasional. Capaian ini tidak terlepas dari potensi wisata yang dimiliki Kepri sangat mentereng, baik dalam kancah nasional maupun internasional. Karena itu, tak heran kalau Kepri memiliki tingkat kunjungan wisatawan dalam maupun luar negeri yang luar biasa pula.

Gambar 1.1 Angka Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau 5 Tahun Terakhir



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau mencapai 2.864.795. Sayangnya pada tahun setelahnya dikarenakan wabah covid-19 jumlah kedatangan mengalami penurunan yang sampai saat ini pun keadaan belum pulih secara keseluruhan. Hal tersebut sejalan dengan data dimana tahun 2020 jumlah kedatangan hanya sejumlah 411.248 kedatangan dan angka terkecil berada di tahun 2021 yang hanya memiliki total 3.103 kedatangan lalu pada 2022 meningkat menjadi berjumlah 758.154. Selanjutnya ditutup oleh jumlah kedatangan tahun 2023 yang berjumlah 1.530.899 kedatangan dan kebanyakan berasal dari pintu masuk wisman yang ada di Batam.

Kota Tanjungpinang adalah salah satu daerah yang ada di Kepulauan Riau yang memiliki potensi dalam sektor pariwisata. Keuntungan besar bagi pemerintah Indonesia khususnya Kepulauan Riau menjadi jembatan bagi

Indonesia, Malaysia dan Singapura karena hal ini menjadi penunjang ekonomi terhadap Provinsi Kepulauan Riau khususnya Tanjungpinang. Pada sektor pariwisata Kota Tanjungpinang berdekatan dengan Kabupaten Bintan dengan memiliki pariwisata yang banyak dikunjungi dari wisatawan luar negeri dengan keindahan wisata yang sangat bagus. Menurut (Nengsih et al., 2022), jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang memiliki banyak pilihan wisata alam, sejarah, dan budaya. Kondisi peluang investasi di sektor pariwisata yang tersedia di Tanjungpinang, terdapat banyak pilihan untuk investasi. Berikut ini tabel Objek dan Daya Tarik Wisata yang berada di Kota Tanjungpinang.

Tabel 1.2 Objek dan Daya Tarik Wisata Kota Tanjungpinang

Objek Wisata	Alamat	Daya Tarik Wisata
Sejarah, Budaya, Religi	Dompok	Jembatan I Dompok Tugu Provinsi Kepri Tugu Asmaul Husna Stadion Sri Buana Mesjid Raya Dompok
	Hulu Riau	Istana Kota Lama Sungai Carang Hulu Riau (Kota Rebah)
	Kota Lama	Benteng Prin's Hendrik Fort Gedung Daerah Gedung Hiburan Belanda Gereja Ayam Kuburan Belanda Kerkhoff Mesjid Agung Al-Hikmah Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Rumah Jil Belanda Tugu Proklamasi
	Pulau Penyengat	Balai Adat Pulau Penyengat Benteng Pertahanan Bukit Kursi Istana Kantor Komplek Makam Engku Putri Raja Hamidah dan Raja Ali Haji Komplek Makam Raja Abdurrahman Komplek Makam Raja Haji Fisabilillah

		Komplek Makam Raja Jakfar Masjid Raya Sultan Riau
	Senggarang	Berkunjung ke Senggarang, Serasa Berada di China
Belanja dan Kuliner	Pelantar Dua	Tempat belanja oleh - oleh khas Tanjungpinang yaitu ikan bilis, kerupuk dan makanan laut kering.
	Jl. Potong Lembu	Akau (pusat kuliner, jajanan, dan tempat makan terbuka)
Tugu dan Monumen	Tanjungpinang Kota	Taman Gurindam 12 Taman Laman Boenda Tepi Laut Gedung Gonggong
	Jl. Adi Sucipto	Trans Studio Garden
	Jl. Asia Afrika KM 14	Patung Seribu Wajah
	Jl. Batu IX	Vihara Ksitigarbha Bodhisattva

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, 2021

Gambar Objek Wisata Sejarah (Masjid Raya Sultan Riau)



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang

Gambar Objek Wisata Belanja dan Kuliner (Akau Potong Lembu)



Sumber: batampos.co.id

**Gambar Objek Wisata Tugu dan Monumen
(Vihara Ksitigarbha Bodhisattva)**

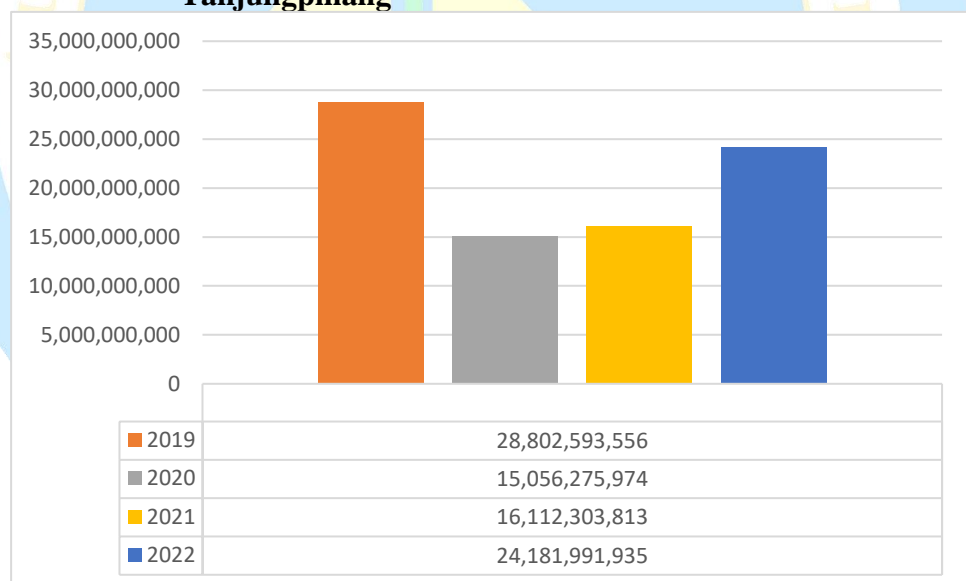


Sumber: CNN Indonesia

Dengan demikian, kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan mengelola pariwisata secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya tarik wisata. Wisatawan asing dan domestik dapat menemukan banyak objek wisata di kota Tanjungpinang, serta berbagai acara yang dirancang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan domestik.

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak ekonomi utama Indonesia, pariwisata berkontribusi pada 4% dari perekonomian nasional, dan pemerintah bercita-cita untuk meningkatkan kontribusi ini dua kali lipat menjadi 8% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Gambar 1.2 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Tanjungpinang



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, 2022

Sedangkan dari data di atas dapat dilihat bahwasanya PAD yang diterima dari sektor pariwisata yang ada di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan yang dibandingkan tahun 2019 dari kontribusinya sebesar 19,40% turun menjadi

10,33% di tahun 2020 dan mulai sedikit meningkat di tahun 2021 menjadi 11,42%. Tahun 2021 kontribusi sektor pariwisata (dalam hal ini pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya walaupun total PAD menurun dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 mengalami peningkatan akibat makin membaiknya penanganan wabah Covid-19 sehingga pemerintah membuka kembali pintu masuk bagi wisatawan asing dan hal ini berdampak pada sektor pariwisata.

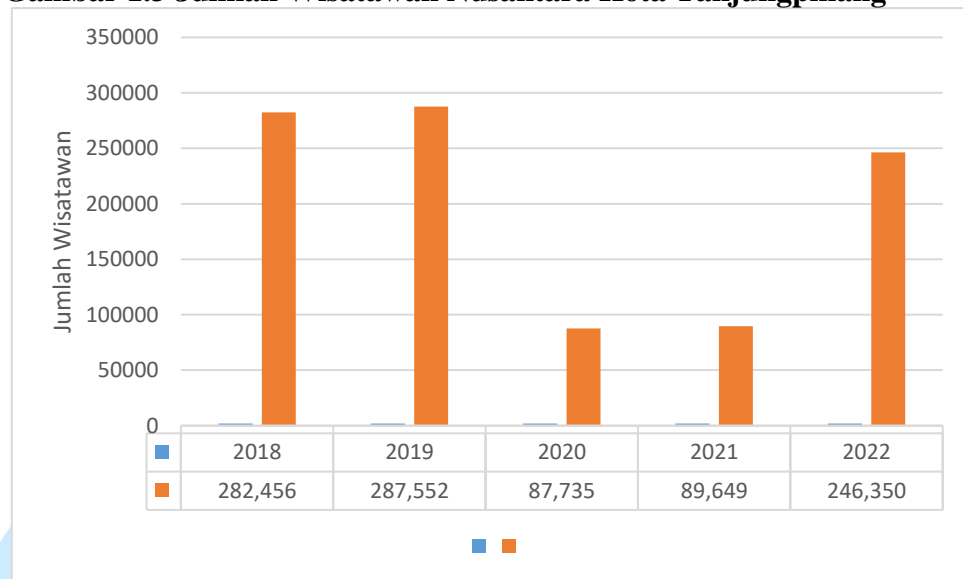
Pengembangan pariwisata berarti mendorong sumber daya wisata, bukan mengeksploitasi mereka secara besar-besaran dalam jangka pendek. Semua orang, termasuk generasi berikutnya, akan mendapat manfaat dari pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Selain keseimbangan dan berkelanjutan dalam komponen ekologi dan ekonomi, pengembangan pariwisata di Indonesia pada umumnya dan di daerah pada khususnya berfokus pada pariwisata yang berorientasi pada keseimbangan pengembangan wilayah dan bertumpu pada masyarakat yang memberdayakan (Mandala et al., 2022).

Pariwisata membantu masyarakat di daerah wisata mendapatkan pekerjaan, dimana satu dari delapan pekerja di dunia bergantung pada pariwisata secara langsung atau tidak langsung. Hal ini tentu dapat meminimalisir tingkat pengangguran disuatu daerah tersebut. Pariwisata juga menjadi faktor bagi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan terus mengalami peningkatan. Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) yang juga merupakan pusat wisatawan lokal dan internasional (Jumardito & Wulandari, 2022).

Dalam pendekatan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sering kali menjadi pilihan pertama. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat dicapai dalam dua cara, yaitu melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan melalui pembagian manfaat pariwisata. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan berarti masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan harapan, keinginan, dan kekhawatirannya tentang pembangunan pariwisata, yang kemudian dapat digunakan sebagai masukan dalam proses perencanaan pariwisata. Sedangkan mengambil peran dalam pembagian manfaat pariwisata berarti bahwa masyarakat seharusnya memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan finansial dari pariwisata dan keterkaitan dengan industri lainnya.

Selanjutnya, pengembangan destinasi pariwisata seharusnya mampu memberikan peluang pekerjaan, kesempatan untuk berusaha, dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan serta pendidikan bagi masyarakat sehingga mereka dapat menikmati manfaat dari pariwisata. Pemberdayaan masyarakat juga dianggap sebagai salah satu model pendekatan yang sangat efektif dalam pembangunan kepariwisataan untuk mendorong partisipasi aktif dari segenap pemangku kepentingan, khususnya masyarakat setempat.

Sektor pariwisata adalah salah satu andalan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan masyarakat. Masyarakat adalah unsur penting pemangku kepentingan untuk bersama-sama dengan pemerintah bersinergi melaksanakan dan mendukung pariwisata berkelanjutan di kota Tanjungpinang.

Gambar 1.3 Jumlah Wisatawan Nusantara Kota Tanjungpinang

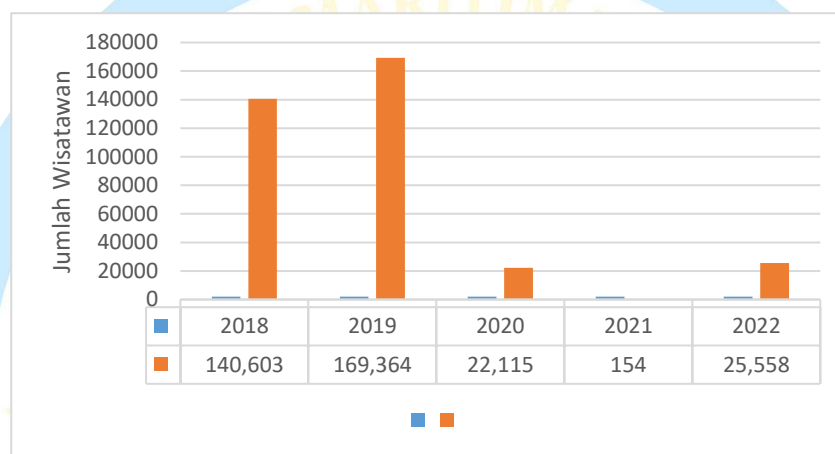
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, 2022

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Tanjungpinang tahun 2018-2019 mengalami kenaikan yang cukup baik, sedangkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 kunjungan wisatawan nusantara bertambah 5.096 wisatawan dari tahun 2018 yang awalnya 282.456 ditahun 2018 menjadi 287.552 ditahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan sangat berkurang yaitu 87.735 dan di tahun 2021 sebanyak 89.649. Memang pada masa pandemi ini kunjungan pariwisata mengalami penurunan pesat, sehingga berdampak signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun 2022 jumlah kunjungan mengalami kenaikan pesat dikarenakan kondisi pariwisata pasca pandemi berangsur pulih.

Tingkat penghunian kamar hotel di Kepulauan Riau semenjak adanya wabah covid-19 mengalami penurunan yang luar biasa, hanya mencapai rata-rata

15 persen sejak virus corona menyebar dan hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan para karyawan dan keberlangsungan hidup industri pariwisata itu sendiri. Dampak virus corona pada ekonomi tidak bisa dihindari. Maka dari itu, banyak karyawan hotel dan industri pariwisata lainnya di Kepulauan Riau dianjurkan untuk cuti, dirumahkan, bahkan diputus hubungannya.

Gambar 1.4 Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan di Kota Tanjungpinang



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang sangat signifikan pada saat masa pandemi, dampaknya hilangnya kepercayaan wisatawan terhadap masalah keamanan dan kesehatan. Melihat perkembangan pariwisata yang ada sekarang terbatasnya jumlah kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh kurangnya promosi dan penyelenggaraan event wisata di Kota Tanjungpinang, event yang diselenggarakan kurang variatif atau tidak cukup menarik bagi berbagai segmen wisatawan, hal ini bisa mempengaruhi minat wisatawan untuk datang dan berpartisipasi. Lalu kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan pariwisata seperti toko

cenderamata, dan lain-lain di Kota Lama. Lalu kurangnya pelibatan biro perjalanan sebagai sarana transportasi massal karena banyaknya jumlah wisatawan yang bepergian secara kelompok, dan moda yang digunakan adalah bus dan sarana angkutan kota menuju tempat dan objek wisata sangat terbatas. Hal lainnya yang bersangkutan dengan sarana dan prasarana ini adalah minimnya sarana hiburan malam di Kota Tanjungpinang. Tempat-tempat santai dan menghibur diri di kota ini seperti diskotik, karaoke dan restoran sangat minim dan tempat hiburan dan makanan tersebut terbatas jumlahnya sehingga tidak cukup banyak pilihan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke kota ini. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam peningkatan pelayanan akomodasi kepada wisatawan. Lalu minimnya pusat informasi di lokasi wisata menyulitkan responden untuk mengetahui secara mendetail tentang objek dan atraksi wisata yang dikunjungi dan dilihatnya. Tidak hanya itu kurangnya peran penyelenggara wisata (biro perjalanan) dan masyarakat dalam penyediaan paket wisata dikarenakan kendala yang dialami oleh biro perjalan dalam menawarkan paket wisata Kota Tanjungpinang seperti minimnya transportasi, minimnya akomodasi, minimnya promosi, minimnya hiburan, dan minimnya atraksi wisata.

Kota Lama Tanjungpinang berlokasi di kawasan Jalan Merdeka, Kota Tanjungpinang. Kawasan ini dulunya ramai karena dekat dengan pelabuhan. Pasar tercipta setelah banyak pedagang membuka kios. Perkampungan di sekitarnya juga mulai muncul secara bertahap. Dipilihnya Kota Lama sebagai lokasi penelitian dikarenakan pelan-pelan kawasan ini makin sepi disebabkan pergesaran pemukiman penduduk ke berbagai sudut di Kota Tanjungpinang membuka simpul

ekonomi baru. Hal itu terjadi bertahun-tahun karena pengembang terus membuka kawasan baru untuk pemukiman penduduk dan perputaran ekonomi yang sebelumnya berpusat di Kota Lama akhirnya berserak. Selain itu Kota Lama juga merupakan kawasan heritage yang memiliki potensi wisata sejarah karena masih banyaknya bangunan bersejarah yang ada di Kota Lama. Oleh karena itu dilakukan revitalisasi sebagai upaya menghidupkan kembali Kota Lama.

Kota Lama telah direvitalisasi sejak tahun 2022, mulai dari jalan setelah Pos Satlantas yang berada di sebelah pintu keluar Pelabuhan Sri Bintang Pura (SPB) Tanjungpinang, wisatawan akan disambut oleh warna warni bangunan di kanan kiri jalan. Di setiap depan bangunan, terpasang tiang lampu yang cantik. Setiap jarak 10 meter tersedia tempat duduk untuk bersantai. Dengan adanya revitalisasi Kota lama tersebut, kawasan tersebut jauh lebih baik wajahnya saat ini. Adanya revitalisasi menjadi daya tarik untuk berkunjung ke Kota Tanjungpinang. Kawasan Kota Lama menjadi destinasi wisata favorit bagi wisatawan dan masyarakat Kota Tanjungpinang sendiri.

Pada pembangunan destinasi wisata Kota Lama pemerintah membutuhkan peran dari masyarakat setempat untuk bekerja sama mengelola kawasan tersebut agar nantinya dapat berkembang menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan dan akan tumbuh menjadi sumber perekonomian di Kota Tanjungpinang. Hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat membentuk suatu kerangka yang dinamakan dengan jejaring. Jejaring yang dilakukan oleh instansi yang telah disebutkan di atas akan membentuk suatu jejaring yang secara teoritis disebut dengan tata kelola jaringan pemerintahan

(*network governance*). Adanya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Bertuah dan Cermin Indah berperan dalam mengelola kawasan tempat mereka tinggal agar dapat menjadi salah satu tempat wisata yang dapat dikunjungi.

Beberapa alasan yang berkaitan dengan apa yang menjadi urgensi penelitian ini dilakukan adalah (1) Alasan didasarkan pada aspek gap teoritis (*Theoretical Gap*), (2) Alasan berdasarkan Penelitian terdahulu atau yang disebut sebagai (*Research Gap*), dan (3) Didasarkan kepada Fenomena empiris menurunnya angka wisatawan yang datang (*Empirical Gap*).

Grand theory dari Penerapan Konsep Governansi Publik ialah teori dari Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir membicarakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat diberlakukan dari beberapa indikator antara lain peningkatan pengetahuan, peningkatan kemampuan/keterampilan serta dengan terkait program yang di berlakukan oleh pemerintah.

Penelitian ini, ingin menjelaskan bagaimana praktik konsep *Network Governance* dalam pengembangan destinasi wisata berbasis Masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang. Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda jika dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya atau *research gap* yang juga menggunakan konsep *network governance*. Perbedaannya terletak pada fokus yakni pada Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat dan lokusnya yakni Kota Tanjungpinang.

Beberapa penelitian yang dimaksud yakni (Hijr et al., 2021) meneliti tentang respon kebijakan terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kota Malang dari perspektif network governance, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola jaringan antar instansi di Kota Malang telah berjalan dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh keberhasilan pelaksanaan program utama, yaitu kegiatan operasi pasar. Namun, masih ada beberapa kendala, salah satunya adalah kualitas beras yang didistribusikan, yang menunjukkan bahwa ada masalah dengan kualitas produk yang perlu ditangani. Selain itu, Kota Malang tidak memiliki Cadangan Beras dari Pemerintah Kota. Ini dapat menjadi kelemahan dalam menghadapi krisis pangan atau fluktuasi pasokan. Meningkatkan pengawasan kualitas beras yang didistribusikan adalah salah satu masalah yang perlu diperbaiki. Untuk mengatasi ketidakmampuan untuk memiliki Cadangan Beras Pemerintah Kota, pemerintah kota Malang dapat mempertimbangkan untuk mencari solusi alternatif atau bekerja sama dengan pihak lain.

Penerapan elemen tata kelola jaringan yang meliputi kepercayaan, konsensus tujuan jaringan, kebutuhan kompetensi tingkat jaringan, jumlah peserta, output, dan outcome pengembangan desa wisata (Pambudi et al., 2022). Penelitian ini menemukan tiga hasil positif dari pengembangan Desa Wisata Podokoyo: memiliki produk unggulan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Podokoyo dalam pengelolaan pariwisata, dan mendapat predikat Desa Maslahat. Kendala yang ditemukan dalam penelitian adalah kurangnya peran unsur pemerintah, terutama dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dapat menjadi fokus perbaikan

perekonomian di daerah tersebut. Penguatan kerjasama dengan pemerintah dapat membantu mengatasi hambatan.

Pelaksanaan kebijakan publik dari perspektif jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi jaringan belum optimal dalam situasi kontradiktif (Nahrawi et al., 2021). Fakta bahwa fungsi jaringan belum mencapai tingkat optimal menunjukkan bahwa ada masalah atau hambatan yang harus ditangani, jaringan terkait kebijakan publik harus lebih efisien. Diperlukan strategi yang lebih baik untuk mengoptimalkan kinerja karena situasi kontradiktif yang sulit dihadapi oleh jaringan. Temuan tersebut mungkin berdampak langsung pada bagaimana kebijakan dibuat. Hasil penelitian ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan terkait saat mereka membuat kebijakan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap keadaan yang rumit. Kondisi kontradiktif yang dihadapi jaringan menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antar instansi atau pihak terkait. Diperlukan upaya dan koordinasi yang lebih baik untuk mengatasi masalah tersebut.

Manajemen dan Kepemimpinan untuk memperkuat tata Kelola jaringan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bintan belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk memperluas partisipasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Tantangan utama adalah perbedaan dalam hal fokus dan kepentingan antar pemangku kepentingan. Untuk mengatasi perbedaan ini, visi dan tujuan bersama harus disesuaikan untuk mengembangkan pariwisata dengan lebih baik. Pemerintah daerah masih bergantung pada media

untuk berbagi informasi dan pengetahuan, terutama media sosial, untuk menyebarkan informasi di era digital. Ini menunjukkan pemahaman akan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk berkomunikasi dengan efektif (Mahadiansar et al., 2021).

Penggunaan media sosial sebagai platform utama menunjukkan kesadaran akan perubahan era digital. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya adaptasi terhadap kemajuan teknologi untuk berkomunikasi dengan efektif. Kesadaran akan transformasi yang terjadi di era teknologi digital ditunjukkan melalui penggunaan media sosial sebagai platform utama. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, langkah-langkah pengelolaan pariwisata yang mendukung inovasi dan adaptasi teknologi harus terus diperkuat. Pengelolaan pariwisata Kabupaten Bintan masih dapat diperbaiki, terutama dalam hal melibatkan semua pemangku kepentingan, mengatasi perbedaan fokus, dan memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi.

Aplikasi SIKEPO, yang merupakan inovasi terbaru dalam pengembangan pariwisata di Kalimantan Barat dengan memanfaatkan teknologi informasi, masih kurang efektif karena belum terselenggaranya rapat koordinasi, tidak adanya wewenang dari setiap aktor yang terlibat dan belum adanya regulasi yang dihasilkan (Patriani & Saputra, 2022). Dengan menyelenggarakan rapat koordinasi yang konsisten sangat penting untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan aplikasi SIKEPO. Ini akan membantu semua pihak yang terlibat berkomunikasi, berbagi informasi, dan menyelesaikan masalah. Untuk memaksimalkan kontribusi, setiap aktor yang terlibat dalam aplikasi SIKEPO harus memiliki wewenang yang

jelas. Agar program dapat dilaksanakan dengan benar, penting untuk menetapkan keterlibatan dan tanggung jawab setiap pihak. Untuk memastikan bahwa aplikasi SIKEPO beroperasi dengan lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan upaya untuk membuat regulasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan aplikasi SIKEPO. Dengan menemukan kendala, perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi aplikasi dalam pengembangan pariwisata.

Menurut Lay dan Masudi dalam (Pambudi et al., 2022) Selain mengoptimalkan pemberdayaan Masyarakat, pengembangan destinasi wisata juga harus mampu memaksimalkan keterlibatan pemangku kepentingan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil. Hal tersebut dapat diimplementasikan melalui penerapan konsep *Network Governance* yang merupakan praktik atau model baru dalam tata kelola yang menekankan pada aspek jaringan untuk membentuk kerja sama dengan melibatkan lembaga di luar pemerintah, baik swasta maupun publik. Dengan kata lain penerapan tata kelola jaringan dapat menjadi salah satu strategi optimalisasi pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang. *Network Governance* dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat berimplikasi tidak hanya menghasilkan pengembangan destinasi wisata yang murni bersifat fisik. Hal ini juga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar untuk penghidupan yang berkelanjutan.

Network Governance adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama antara entitas pemerintahan (negara dan aktor di luar negara) melalui pembentukan

tatanan pribadi dan untuk merancang sebuah mekanisme jejaring baik dalam bentuk kontrak ataupun non-kontrak dan memungkinkan untuk mengikat mitra kerja dalam sebuah aturan yang tertulis (Therrien & Normandin, 2020). Di dalamnya terdapat kombinasi antar struktur dalam pemerintahan yang saling bekerjasama yang jika dikelola secara konsisten mampu mengefektifkan tujuan pembangunan/kebijakan yang ditetapkan (Bonso & Suranto, 2018). Untuk alasan itu tata kelola jaringan pemerintahan membutuhkan reputasi, kepercayaan, timbal balik, saling ketergantungan dan saling menguntungkan. Ini berangkat dari logika kebijakan yang memang membutuhkan jaringan agar perencanaan dan implementasinya dapat efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul “*Network Governance* Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Lama Tanjungpinang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti terfokus pada masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana praktik *Network Governance* antar aktor yang terlibat dalam upaya pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang ada di Kota Lama Tanjungpinang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pada praktik *Network Governance* dalam upaya pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang ada di Kota Lama Tanjungpinang?

3. Bagaimana faktor-faktor penentu pada praktik *Network Governance* dalam upaya pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang ada di Kota Lama Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini yang akan dibahas, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik *Network Governance* antar aktor yang terlibat dalam upaya pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang ada di Kota Lama Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pada praktik *Network Governance* dalam upaya pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang ada di Kota Lama Tanjungpinang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penentu pada praktik *Network Governance* dalam upaya pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang ada di Kota Lama Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti sendiri dan dijadikan salah satu referensi bagi peneliti yang lain berkaitan dengan *Networks Governance* dalam pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang ada di Kota Lama Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti yang akan datang dan sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan karya tulis serta memperkaya hasil penelitian khususnya penelitian administrasi negara.

